

***PSEUDO-GOVERNMENT:
PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN***

***PSEUDO-GOVERNMENT:
THE EMPOWERMENT PROGRAM
OF FAMILY HOPE ENTREPRENEURSHIP GROUP***

Achmad Buchory

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS) Regional III
Kementerian Sosial RI Jl. Veteran No. 8 Yogyakarta.

Telp. 085647252137

Email: *Syahdan2007@gmail.Com*

Naskah Diterima 11 Februari 2018, Direvisi 15 April 2018, Disetujui 28 April 2018

Abstract

The Ministry of Social Affairs as main stakeholder rolls out Independent Welfare Village based on Joint Entrepreneurship Group in a bid to cope social welfare problem independently. The program target are village with high social problems but having maximum potential empowering social welfare resources ability. Social empowerment in Jaten district cannot be rid of from pseudo-government influence in optimization the implementation of family hope entrepreneurship group program to form DSM. The interesting phenomenon in the process of program implementation was there were collective opponents from stakeholders to keep the program going as procedure. The research means to study a pseudo-government phenomenon that happens during social aid was rolled out. The research question was how pseudo-government influenced in economic and social empowerment on targeted family to materealize self-sustained social welfare village? The research goal is to describe and analysis the practice of pseudo-government to form independent welfare village done by elite in Jaten district. The research owes Bourdieus sociology theory on field, habiitus, and capital. The research used qualitative method through phenomenology. Data gathered through depth interview, observation, focus group discussion, and documentary analysis. The research process runs through cyclical interactive. The research reveals that pseudo government practice in social aid program on independent welfare village have negative effect on the implementation of the program. The practice has marginalized the social guidance role and rose social conflict. The practice rose strategic creativity to uphold the goal of DSM program implementation.

Keywords: Pseud-Government, Independent Welfare Village.

Abstrak

Kementerian Sosial selaku stakeholder utama menggulirkan program Desa Sejahtera Mandiri berbasis KUBE dalam upaya untuk memandirikan desa dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Program ini menyasar pada desa-desa yang memiliki jumlah PMKS yang tinggi akan tetapi memiliki PSKS yang bisa dioptimalkan kinerja pemberdayaanya. Pengguliran bantuan di Kecamatan Jaten tidak dilepaskan adanya pengaruh *pseudo government* yang mempengaruhi ke-optimalan pelaksanaan pemberdayaan Kube PKH untuk membentuk DSM. Fenomena menarik pada proses pelaksanaan ada perlawanan kolektif yang dilakukan oleh para stakeholder program di Kecamatan Jaten agar program berjalan sesuai dengan prosedur. Penelitian ini bermaksud mengkaji fenomena *pseudo government* yang terjadi pada pengguliran bantuan sosial Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh

pseudo government dalam praktik pemberdayaan sosial ekonomi pada program Kube bagi warga binaan PKH untuk membentuk Desa Sejahtera Mandiri?”. Tujuan penelitian ini adalah Mendiskripsikan dan menganalisis Praktik *Pseudo Government* pada pemberdayaan Kube PKH Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri yang dilakukan oleh para elite penguasaan di Kecamatan Jaten. Penelitian ini meminjam teori sosiologi yang ditawarkan Bourdieu, yaitu arena (*field*), habitus, dan kapital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumen. Proses tersebut berjalan secara siklus interaktif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa praktik *pseudo government* pada program bantuan sosial kube pengembangan desa sejahtera mandiri ternyata berdampak negatif pada pelaksanaan program. Praktik ini juga telah memarginalkan peran pendamping dan juga memunculkan konflik sosial. Praktik ini juga memunculkan kreativitas strategi pemberdayaan untuk mempertahankan tujuan pelaksanaan program DSM.

Kata kunci: *Pseudo Government*, Desa Sejahtera Mandiri.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah multi dimensional karena menyangkut banyak aspek dan faktor baik faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik disamping jumlahnya masih cukup besar dan sebarannya luas. Dokumen pengurangan kemiskinan secara global, *Millenium Development Goals* (MDGs), mematok tahun 2015 sebagai batas waktu pencapaian tujuan pembangunan yang dicita-citakan. Usaha pembangunan melalui program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum mampu memenuhi target penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 %. Berdasarkan data tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 27,73 juta jiwa (10,96 %) dari jumlah tersebut yang tinggal diperkotaan 8,16 % dan perdesaan 13,76 %. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk penanganan kemiskinan, namun masih terjadi perbedaan secara signifikan antara target yang ingin dicapai dengan realisasi. Angka kemiskinan tetap tinggi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Pemerintah menargetkan kemiskinan mengalami penurunan hingga menjadi 7-8% diakhir RPJMN 2019. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah upaya strategi yang mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan berdasar UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengsinergikan berbagai potensi

dan sumber kesejahteraan sosial kedalam perlibatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif.

Salah satu Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang memiliki potensi dalam mensinergikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin (KM). Sebagai imbalannya keluarga miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan (Pedoman Umum PKH, 2009). Program ini digulirkan tahun 2007 sebagai wujud untuk memenuhi target *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu angka kemiskinan berkisar antara 8-10% (Marwan Jaf'ar, "Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan, hal. 3: 2015). Program ini dikawal oleh pendamping yang direkrut oleh Kementerian Sosial untuk memberikan pendampingan sosial secara intens dan komperhensif kepada keluarga miskin penerima bantuan agar penggunaan dana bantuan tersebut tepat sasaran dan produktif. Sedangkan program KUBE/UEP merupakan program pemberdayaan sosial yang digulirkan oleh direktorat fakir miskin bertujuan menciptakan kewirausahaan di kalangan keluarga miskin sehingga modal yang digulirkan dapat berkembang dan memberikan manfaat peningkatan pendapatan keluarga. Program KUBE memiliki ciri khas untuk mengembangkan bantuan finansial dari Kementerian Sosial.

Pelaksanaan PKH dan KUBE yang sudah memasuki tahun ke 8 ini telah memunculkan pola-pola fenomena baru dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini telah membentuk komunitas keluarga sangat miskin di masyarakat untuk secara bersama-sama menyelesaikan masalah sosial yang alami. Mereka terbentuk atas prakasa dari pendamping PKH sebagai upaya dalam memudahkan melaksanakan kegiatan validasi data dan pencairan dana bantuan PKH. Dengan dibentuknya kelompok tersebut maka akan memudahkan para pendamping PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan sosial kepada para peserta keluarga sangat miskin penerima bantuan PKH. Skema program bantuan yang berbasiskan pendampingan kelompok inilah diharapkan akan menciptakan suatu bentuk kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang membelenggu masyarakat. Kelompok anggota PKH dibentuk atas dasar kedekatan lokasi tempat tinggal dan juga dengan susunan anggota yang bervariasi dari segi umur maupun tingkat pendidikan. Dengan demikian kelompok ini akan membangun kesolidan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan PKH serta diharapkan mampu membangun Desa Sejahtera Mandiri (DSM) (Laporan Evaluasi PKH Tahun 2015: Hal. 2-3).

Menguatnya relasi sosial dan ikatan sosial dalam memunculkan Usaha Ekonomi Produktif tidak lepas dari peran pendamping PKH yang menjadi individual aktor yang menciptakan peluang untuk memanfaatkan sumberdaya (*resource*) yang terendap dalam relasi-relasi sosial untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau manfaat sosial. Dengan demikian apabila individual aktor dalam posisi pasif atau tidak aktif menjalin relasi dengan aktor-aktor lain maka potensi investasi sosial yang terendap pada kelompoknya sukar di identifikasi (Sunyoto Usman, "Pengembangan Masyarakat Berbasis Modal Sosial", 2013: www.uny.ac.id). Dengan demikian potensi investasi sosial yang teridentifikasi melalui proses interaksi sosial dalam bentuk praktik sosial akan dapat menciptakan sebuah transformasi

sosial di masyarakat dalam membentuk desa sejahtera mandiri.

Desa Sejahtera Mandiri adalah desa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak dasar, melindungi warganya dari berbagai resiko sosial dan ekonomi yang dirasakan, memelihara kearifan lokal, mengendalikan konflik sosial yang terjadi di lingkungannya, dan menjadi bantalan sosial bagi warganya yang mengalami berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh potensi dan sumber yang dimiliki (Pedoman Teknis Desa Sejahtera Mandiri, Kementerian Sosial, 2016: Hal 15). Model pengembangan desa sejahtera mandiri berdasarkan pendekatan kawasan terpadu atau ekologis. Karakteristik utama dari Desa Sejahtera Mandiri adalah proses transformasi sistem lingkungan yang menjamin perubahan tatanan sosial ekonomi masyarakat secara komperhensif dengan meletakkan masyarakat sebagai *entrepreneur*. Transformasi sosial terjadi karena unsur energi sosial yang saling bersinergi antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, termasuk jaringan sosial pendukungnya.

Proses pembentukan desa sejahtera mandiri tidak lepas dari pola praktik sosial dalam bentuk mobilisasi secara sinergis antara aktor-aktor sosial seperti Stakeholder kunci (pendamping dan kelompok UEP), Stake Holder Utama (pemerintah) dan Stakeholder Pendukung (dunia usaha dan lembaga sosial desa) menjadi modal sosial yang tangguh. Modal sosial yang dimaksud antara lain komitmen dan tanggung jawab bersama yang dielaborasi ke dalam hubungan kolaborasi, koordinasi, kooperasi, dan harmonisasi antar aktor. Keterkaitan hubungan ini merupakan kekuatan mendasar dalam memperkokoh sinergitas Desa Sejahtera Mandiri. Dengan kata lain, modal sosial adalah salah satu nilai dasar yang jika dikelola mampu menjadi energi sosial yang sangat kuat untuk mendukung penerapan Desa Sejahtera Mandiri. Disamping modal sosial, ada dukungan modal lain diantaranya modal finansial, modal budaya, modal simbolik bahkan sampai modal politik. Modal tersebut menjadi dasar terjadinya praktik *pseudo government*

saat pengguliran bantuan berlangsung. Praktik *pseudo government* adalah suatu praktik negara bayangan yang dilakukan oleh aktor-aktor diluar struktur program untuk mengendalikan proses pelaksanaan program khususnya bantuan sosial. Seperti yang terjadi di Kecamatan Jaten bahwa praktik *pseudo government* dalam pengguliran bantuan pemberdayaan oleh stakeholder utama malah dilakukan oleh elit desa yang notabeneanya bukan bagian dari struktur program. Para elit tersebut secara cerdas memanfaatkan modal simbolik dan modal politiknya yang kuat untuk mempengaruhi dan mengendalikan proses pengguliran bantuan sosial di masyarakat.

Penelitian ini akan melihat bagaimana proses praktik *pseudo government* pemberdayaan dalam pembentukan KUBE dari kelompok keluarga miskin binaan PKH. Petunjuk teknis yang disusun oleh stakeholder utama dalam program KUBE telah merespretasikan model pemberdayaan sosial yang bersifat bottom up. Petunjuk teknis juga memberikan kesempatan bagi stakeholder pendukung untuk memberikan support terhadap KUBE agar bisa menjalankan usaha yang sudah ditentukan. Dengan konsep demikian maka program KUBE yang digulirkan kepada kelompok keluarga miskin akan bisa menciptakan kesejahteraan bagi penerima manfaat tersebut. Peran stakeholder kunci menjadi sangat besar karena harus memberikan pendampingan dan menerapkan strategi pemberdayaan yang pas agar program ini terus terkawal dan tidak menyimpang dari petunjuk teknis yang di susun oleh stakeholder utama.

Dinamika di arena sosial program Kube juga menjadi kajian utama dari penelitian ini. Adanya praktik *pseudo government* yang dilakukan oleh para aktor di luar stakeholder menjadi temuan awal suatu permasalahan program yang akan di gali dalam penelitian. Praktik *pseudo government* bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi kuasa dari segelintir aktor kepentingan yang masuk dalam stakeholder telah menciptakan kondisi habitus baru sulit tercapai. Hal ini dirasa oleh aktor yang berada dalam stakeholder kunci memiliki beban tugas untuk melakukan pendampingan sosial terhadap Kube agar proses pelaksanaan sesuai dengan

habitus baru yang diciptakan oleh stakeholder utama. Modal politik dan modal simbolik yang dimiliki oleh para elit diluar struktur ternyata dapat mempengaruhi siapa yang berhak menerima bantuan Kube PKH Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri di Kecamatan Jaten. Maka dari itu, dari pengamatan awal yang dilakukan peneliti ada beberapa Kube ditemukan tidak bisa menjalankan aktivitas usahanya dan aktivitas sosialnya akibat adanya praktik *pseudo government*.

Dengan temuan awal data dalam pelaksanaan program Kube PKH pengembangan DSM, maka peneliti akan melihat pola pemberdayaan yang dilakukan ketika adanya dominasi kuasa yang dilakukan oleh elite-elite penguasa baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Pelaksanaan pemberdayaan program Kube PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri memiliki 6 (enam) yang menjadi kekhasan di Kecamatan Jaten dalam mengatasi pola tekanan dari praktik *pseudo government*. Adapun 6 (enam) penalaran tersebut adalah; **Pertama**, Aktor/Agen. Pada konsep ini aktor disebutkan sebagai pelaku atau agen yang menggerakkan masyarakat untuk membangun usaha ekonomi produktif sebagai penunjang berdirinya desa sejahtera mandiri. Aktor dan agen sosial yang menjadi agen perubahan warga binaan PKH adalah para stakeholder yang terdiri dari kelompok warga binaan PKH dan pendamping (stakeholder kunci), kementerian sosial dan pemerintah daerah (stakeholder utama), serta dunia usaha, lembaga sosial, dan jaringan lainnya (stakeholder pendukung) yang mendukung pembentukan Desa Sejahtera Mandiri. Para aktor ini saling berinteraksi satu sama lainnya untuk melaksanakan pemberdayaan agar tercipta kemandirian Kube PKH yang menerima bantuan. Akan tetapi dari data awal yang diterima peneliti melalui observasi awal ternyata para aktor ini bermain dengan para elite penguasa mengendalikan bantuan sosial untuk kepentingan politisnya.

Kedua, Struktur. Model struktur yang menjadi kajian dalam penelitian ini merupakan suatu bangunan struktur sosial diantara aktor dan agen yang mendukung dalam praktik

pemberdayaan sosial ekonomi warga binaan PKH dalam membentuk desa sejahtera mandiri. Bangunan struktur merupakan ranah dalam menjalankan praktik sosial dan ekonomi agar ada kemanfaatan dari desa sejahtera mandiri dalam menanggulangi kemiskinan. Struktur juga diartikan berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Struktur program Pemberdayaan Kube PKH pengembangan DSM di Kecamatan Jaten secara formal telah terbentuk bangunan yang kompleks dan berjenjang. Komplektisivitas yang berjenjang telah menumbuhkan praktik pemberdayaan yang bersifat bottom up. Dinamika yang terjadi di lapangan ternyata struktur bangunan berjenjang ini telah memicu dominasi praktik *pseudo government* yang dilakukan oleh para penguasa di Kabupaten maupun desa.

Ketiga, Modal/Aset. Konsep ini dipahami dalam suatu kerangka kerja pendukung terbentuknya desa sejahtera mandiri. Aset/modal juga dimaknai sebagai modal-modal yang memiliki potensi sosial dalam mendukung keberhasilan dari pembentukan desa sejahtera mandiri. Adapun aset atau modal yang dapat ditemukan di Kecamatan Jaten dalam melaksanakan pemberdayaan Kube PKH pengembangan DSM diantaranya adalah aset finansial, budaya, sosial, simbolik dan politis. Kube PKH yang terbentuk di Kecamatan Jaten rata-rata sudah memiliki 2 (dua) aset utama yaitu aset budaya dan aset sosial didukung oleh potensi daerah yang masuk dalam kawasan perindustrian. Para stakeholder berupaya untuk menguatkan 3 (tiga) modal lainnya agar dominasi kuasa yang dilakukan oleh para elite penguasa bisa dikurangi.

Keempat, akses. Aset-aset yang dibutuhkan untuk melangsungkan pengelolaan desa sejahtera mandiri belum tentu ada, atau meskipun ada namun belum tentu menguasai aset tersebut. Pengadaan dan penguasaan aset atau modal membutuhkan pintu masuk, jalur atau penghubung. Inilah yang disebut

dengan akses. Dalam konteks pengadaan dan penguasaan aset atau modal dapat diwujudkan melalui relasi sosial, kelembagaan, dan organisasi yang dilakukan oleh aktor atau agen yang terlibat. Relasi sosial untuk membangun akses pemberdayaan Kube PKH di Kecamatan Jaten sudah dilakukan oleh stakeholder utama dan kunci. Akan tetapi adanya tekanan secara terpadu dari para pemangku kepentingan menyebabkan sulitnya para stakeholder untuk mengembangkan jaringan relasi untuk memnguatkan modal yang dimiliki Kube PKH.

Kelima, Strategi Pemberdayaan, suatu kelompok UEP yang mengelola usahanya setelah menguasai aset atau modal melalui aksesnya dalam berelasi sosial, selanjutnya memikirkan keberlanjutan usahanya dengan tetap menguasai dan mengelola aset atau modal tersebut. Inilah yang disebut sebagai strategi pemberdayaan. Strategi pemberdayaan Kube PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial kecamatan sudah sesuai dengan konteks bottom up dimana penentuan jenis usaha sampai pengelolaan usaha sudah diserahkan kepada anggota Kube. Tetapi, strategi ini terbentur dengan adanya praktik *pseudo government* untuk kepentingan politisnya. Ada Kube yang bisa menjalani praktik pemberdayaan secara bottom up tapi ada pula yang dikendalikan oleh kepentingan penguasa.

Keenam, Outcomes penghidupan. Ujung dari penguasaan dan pengelolaan aset atau modal melalui bentuk UEP serta strategi pemberdayaan adalah terwujudnya desa sejahtera mandiri yang mampu memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dimasyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di desanya. Outcomes penghidupan adalah akselerasi dari pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial di desa terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan melalui pemanfaatan aset potensi desa.

Berangkat dari latar belakang ini, penelitian ini akan melihat aspek sosiologis dari pelaksanaan PKH dalam mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri melalui KUBE di Kecamatan Jaten dimana realitas sosialnya

mengalami fenomena *pseudo government* dalam pelaksanaan programnya dan terjadi akumulasi modal yang ada dimasyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digolongkan dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif dipilih karena fokus kajian dan masalah yang diteliti bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin bila data pada situasi sosial ini diperoleh dengan penelitian kuantitatif. Tujuan digunakannya metode penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui secara mendalam proses sosial dalam pemberdayaan ekonomi produktif warga binaan PKH dalam mewujudkan terbentuknya desa sejahtera mandiri. Interaksi sosial dalam wujud bangunan relasi dan jaringan sosial antara aktor pemberdayaan yaitu stakeholder kunci, stakeholder utama, dan stakeholder pendukung yang akan menjadi kajian analisis penelitian ini. Artinya dalam memperoleh data terkait pokok pembahasan peneliti akan memfokuskan pada proses sosial yang mendukung keberhasilan KUBE dalam membentuk desa sejahtera mandiri untuk menanggulangi kemiskinan. Disamping itu dengan menggunakan metode kualitatif akan bisa mengungkap praktik *pseudo government* pada pengguliran program Kube PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri yang telah digulirkan di Kecamatan Jaten.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologis merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mengungkapkan tentang realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Melalui pendekatan fenomenologis, peneliti berusaha untuk memahami makna peristiwa yang menjadi pengalaman individu serta interaksi antara individu atau kelompok dalam situasi tertentu secara proposional dan akurat. Selain itu pendekatan fenomenologi

akan membantu peneliti dalam memandang realitas sosial, fakta sosial, dan fenomena sosial sebagai dunia objektif dari bermaknaan nilai-nilai dalam kesadaran suatu individu atau kelompok masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga makna simbol dan tindakan dari subjek yang diteliti dapat dipahami secara mendalam sesuai dengan realitas dalam masyarakat itu sendiri.

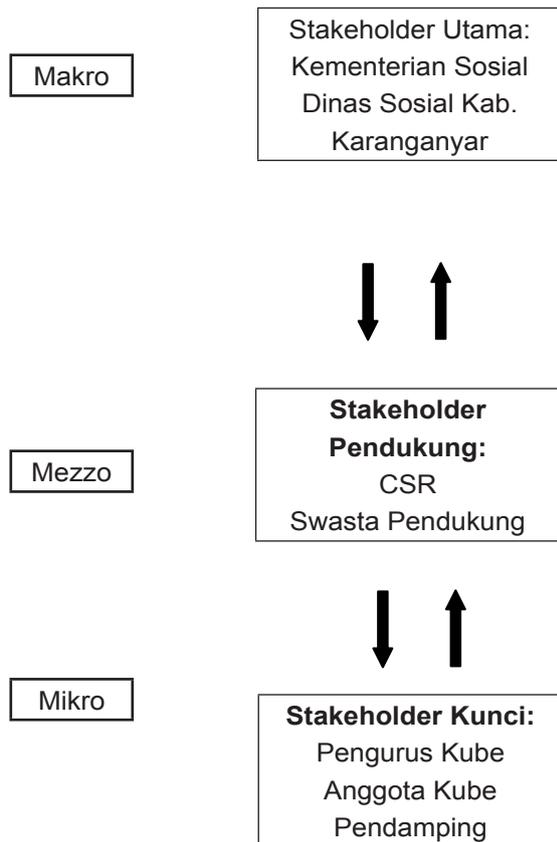
Secara khusus, penelitian mengambil kasus mengenai praktik *pseudo government* pada pemberdayaan sosial ekonomi pada program Kelompok Usaha Bersama untuk membentuk Desa Sejahtera Mandiri yang terjadi di Kecamatan Jaten. Lokasi ini menjadi daerah penelitian dikarenakan memiliki Kube yang banyak dan potensi ekonomi yang tinggi. Disamping itu daerah ini merupakan satelit ekonomi di Kabupaten Karanganyar.

Dalam penjarangan informasi atau data, peneliti melakukan pemilihan informan (individu) dengan teknik snowball (bergulir) untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya melakukan perbandingan bila data yang diperoleh nantinya menunjukkan kategori atau ciri yang berbeda pada individu penerima bantuan PKH dan KUBE dari Kementerian Sosial untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut. Selain itu, pihak diluar individu penerima bantuan Kube yaitu pendamping kube dan pemerintah menjadi bagian lain unit analisis sehingga dapat memperoleh data, informasi yang menyeluruh dan relevan dengan kajian penelitian sekaligus sruana *cross check* bila berhadapan dengan kenyataan ganda dilapangan.

Pada penelitian level unit analisisnya dibagi menjadi beberapa unit analisis yaitu analisis makro, analisis mezzo, dan analisis mikro. Unit analisis makro meliputi stakeholder utama yaitu kementerian sosial dan pemerintah daerah kabupaten karanganyara melalui dinas sosial. Unit analisis mezzo merupakan stakeholder pendukung dimanan terdiri dari CSR yang ada di kecamatan Jaten dan pelaku usaha swasta yang memberikan dukungan

usaha kepada Kube. Sedangkan unit analisis mikronya adalah stakeholder kunci yang terdiri dari pendamping dan para penerima bantuan dalam hal ini pengurus dan anggota Kube. Berikut ilustrasi dari unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

Bagan 1.3
Level Unit Analisis Penelitian

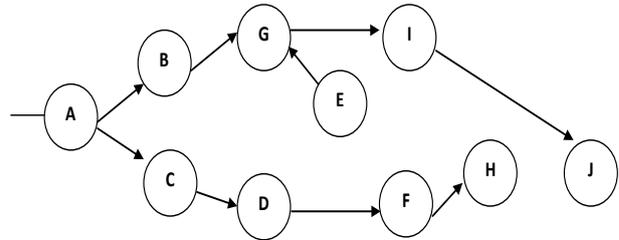


Sumber: Pemikiran Penulis

Pengambilan informan (unit analisis) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menggunakan teknik snowball karena disesuaikan dengan kebutuhan, dimana peneliti melakukan pemilihan pihak atau aktor tertentu yang dipertimbangkan dapat memberikan data. Aktor pertama yang kami tunjuk sebagai informan awal adalah supervisor pendamping Kecamatan yaitu mas Iwan. Dari aktor pertama, peneliti mendapatkan sumber data utama yaitu pendamping dan Anggota Kube PKH di Kecamatan Jaten. Data informasi yang diberikan oleh pendamping dan anggota Kube PKH menjadi utama untuk dilakukan

perbandingan pengecekan data kepada aktor lain yaitu stakeholder utama dan stakeholder pendukung. Setiap aktor antar stakeholder akan memberikan rekomendasi data sehingga bisa didapat data yang benar-benar valid.

Bagan 1.4
Proses Pengambilan Data Informan



Sumber: Sugiyono, 2006:220

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa peneliti telah memperoleh data informasi awal dari proses observasi yaitu supervisi pendamping Kube Kecamatan Jaten (A) sebagai sumber data pertama yang peneliti anggap memiliki pengetahuan terhadap keseluruhan objek penelitian. Dari sinilah kemudian Supervisi Pendamping Kube merekomendasikan kepada informan baru yaitu pendamping kube (B) dan Anggota Kube (C) peneliti belum memperoleh data lengkap maka peneliti menuju Kabid Pemberdayaan Kabupaten Karanganyar (D) dan para pelaku dunia usaha (G) sampai informan berikutnya sehingga data yang diperlukan mencukupi dilakukan analisis.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Di Kecamatan Jaten ada 298 keluarga sangat miskin yang menerima manfaat dari program keluarga harapan (Sumber: PLKB tahun 2015). Mereka didampingi oleh 1 orang supervisor pendamping Kecamatan yang selalu memonitoring jalanya program keluarga harapan. Berawal dari informasi masyarakat penerima bantuan Kube PKH bahwa di pengaruh elite-elite penguasa terhadap pengguliran bantuan sangat kuat. Hal ini terbukti dari penerima bantuan rata-rata adalah masyarakat yang dekat dengan elite penguasa seperti partai, kepala desa, atau pendukung salah satu anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Disamping dari informasi dari informan pertama

bahwa pendamping sosial yang direkrut adalah orang-orang partai. Dengan demikian pengaruh penguasa terhadap bantuan sosial sangat kentara termasuk bantuan Kube PKH.

Di Kecamatan Jaten ada 53 Kube PKH yang digulirkan oleh stakeholder utama dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Kube-kube tersebut tersebar di 8 (delapan) desa yang berada di Kecamatan Jaten. Pengguliran bantuan Kube oleh stakeholder utama disesuaikan dengan potensi desa yang mendukung untuk berwirausaha. Pengguliran bantuan juga diberikan kepada desa yang memiliki potensi kemandirian dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial pula. Sehingga bantuan Kube PKH tersebut dapat memberikan manfaat yang positif bagi penerima manfaat.

Dari 53 Kube yang digulirkan oleh stakeholder utama ada sekitar 40 Kube yang masih berjalan sesuai dengan harapan dan sisanya yaitu 13 Kube PKH mengalami stagnasi atau usahanya tidak berjalan baik. Dari 40 Kube yang berjalan ada 2 Kube yang memiliki potensi dalam mengembangkan Desa Sejahtera Mandiri yaitu Kube Handayani dan Kube Langgeng Sejahtera. Dua kube ini memiliki perkembangan usaha yang signifikan dan dibentuk oleh pendamping sosial Kube sesuai dengan arahan pedoman yang ditentukan oleh stakeholder utama. Dengan demikian penelitian di fokuskan pada 2 Kube. Disamping itu, melakukan pendalaman data terhadap 5 Kube lainnya yang dikategorikan berjalan biasa dan stagnan. Hal ini untuk perbandingan data penelitian terhadap pola pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping sosial Kube. Dengan demikian peneliti bisa mendapatkan data yang valid pada kube-kube tersebut.

Pengumpulan data dilakukan kombinasi teknik dengan beberapa tools (alat kajian) yang lazim disebut "triangulasi" yang merupakan alat pengumpul data sekaligus untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi yang dimaksud meliputi: (a) triangulasi data atau sumber data yaitu dalam pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumber data berupa data primer dari hasil wawancara, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD) maupun data

sekunder berupa dokumentasi yang ada; (b) triangulasi metode yaitu penelitian yang sejenis berupa metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD; (c) triangulasi peneliti yaitu peneliti melakukan review dari hasil penelitian dilakukan oleh beberapa peneliti yang sama atau menggunakan pendekatan sama dengan kajian penelitian ini serta (d) triangulasi teori yaitu peneliti dalam membahas permasalahan yang sedang dikaji tidak menggunakan satu perspektif teori tetapi diskoneksikan dengan teori lain yang dimiliki relevansi untuk lebih memperdalam analisa data hasil penelitian.

Pengolahan data dimulai dengan mendeskripsikan praktik *pseudo government* pada pengguliran bantuan Kube PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri. Penulis berprinsip membiarkan realitas berbicara apa adanya (*let's the reality say something*), melalui observasi, wawancara mendalam maupun studi dokumen. Penulis mencatat apa yang *key informan* ketahui, dengar, lihat, dan lakukan ketika terjadi praktik *pseudo government* yang berujung pada penguasaan bantuan sosial di Kecamatan Jaten. Peneliti juga berupaya mengungkap terjadinya praktik pemberdayaan Kube PKH dengan strategi tertentu untuk mengatasi pengaruh negatif dari *pseudo government*. Di samping itu, hasil observasi dan studi dokumen diselaraskan dengan hasil wawancara. Data kemudian dikonstruksi sesuai dengan apa yang subyek ketahui.

Penulis kemudian merentangnya ke dalam beberapa kategorisasi, memilah-milah data berdasar substansi temuan, dan pada saat yang sama dilakukan proses reduksi data. Penulis hanya mengambil data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis kemudian melihat kecenderungan-kecenderungan, mencari hubungan asosional antara data yang satu dengan lainnya. Pada saat inilah penulis berdialog dengan teori-teori sosiologi. Dialog dengan teori ini memerlukan waktu yang lama, karena pilihan teori yang digunakan untuk berdialog harus tepat. Selanjutnya, peneliti juga melakukan interpretasi (pemaknaan) terhadap tindakan sosial yang terjadi di Kecamatan Jaten ketika program pemberdayaan dilaksanakan.

Semua proses pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara siklus interaktif. Pada saat pengumpulan data, penulis sekaligus melakukan analisis. Pada waktu melakukan analisis, dan ditemukan datanya kurang, maka penulis melakukan pengumpulan data kembali. Pola demikian berlangsung terus sampai dengan penelitian dianggap selesai. Oleh karena itu, wawancara mendalam dilakukan berulang-ulang dengan tujuan memperoleh pemaknaan yang sebenarnya dari praktik pseudo government pemberdayaan kube pkh pengembangan desa sejahtera mandiri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Daerah Penelitian

1. Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Kawasan Produktif

Walaupun terletak dipinggiran sebelah barat Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten memiliki potensi wilayah yang produktif secara geografi. Hal ini letak Kecamatan Karanganyar berada pada jalur barang yang menghubungkan dua Provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Disamping itu secara geografi memiliki lahan yang produktif untuk pertanian maupun pembangunan pabrik. Oleh karena itu dengan letaknya yang sangat strategis tersebut, maka Kecamatan Jaten mulai tumbuh menjadi daerah industri dan juga pertanian pada awal tahun 1990-an.

Pertumbuhan industri di Kecamatan Jaten semakin menjadi-jadi sehingga menjadi kawasan industri di Kabupaten Karanganyar. Bangunan pabrik mulai menggeser lahan-lahan pertanian. Perkembangan industri yang sangat pesat, maka menarik masyarakat di sekitarnya untuk bermigrasi ke Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Akibatnya, lahan pertanian mulai digeser untuk pembangunan perumahan baik perumahan sederhana sampai mewah. Pertumbuhan yang mengarah pada industrialisasi telah memunculkan usaha niaga sehingga banyak pula para investor mulai mendirikan bangunan pertokoan baik yang bertaraf kecil sampai pada tahun 2010 berdiriilah sebuah Mall Plasa Palur. Jadi secara geografi

Kecamatan Karanganyar mentransformasi diri dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri yang besar di Kabupaten Karanganyar sehingga telah dapat memberikan ide penanganan kesejahteraan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa pembentukan Usaha Ekonomi Produktif.

2. Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Jaten

Penduduk Kecamatan Jaten dilihat dari data mata pencahariannya menunjukkan bahwa masyarakatnya didominasi pada pekerjaan buru yaitu baik buruh formal (pabrik) dan buruh non formal (bangunan, tani, serabutan, dll). Pekerjaan kelas menengah diatas tidak begitu mendominasi akan tetapi sangat merata diberbagai desa. Melihat data pekerjaan tersebut, tingkat kesejahteraan sosial di Kecamatan Jaten bisa dibilang masuk dalam daerah yang memiliki kesajahteraan mencukupi. Pendapatan rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Karangnyar Rp. 1.5000.000. Angka pendapatan demikian lebih dari sekedar cukup untuk membangun keluarga yang sejahtera dimana biaya hidup di Kecamatan Jaten tidak begitu tinggi.

Data kependudukan Kecamatan Jaten menunjukkan jumlah penduduk kategori miskin berjumlah 4.482 keluarga (lihat Tabel 2.5). Mereka dikategorikan keluarga miskin yaitu keluarga Pra Sejahtera dan keluarga sejahtera I. Keluarga yang masuk dalam kategori inilah yang menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Kementerian Sosial untuk mendapatkan berbagai program bantuan sosial yang digulirkan. Rata-rata mereka masuk dalam keluarga miskin dikarenakan keterbatasan akses pekerjaan dan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri untuk mendapatkan pendapatan. Hal ini sangat ironis apabila dilihat keadaan geografis yang berada di daerah Industri dan memiliki akses jalan provinsi yang menghubungkan dua provinsi di Pulau Jawa. Letak yang strategis inilah yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendapat rumah tangga yang layak serta bisa keluar dari Pra Keluarga Sejahtera atau Keluarga Sejahtera Kategori I.

Praktik *Pseudo Government* Dalam Pemberdayaan Kube PKH Pengembangan DSM

1. Program Kube PKH Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri

Program DSM yang akan digulirkan oleh Kementerian Sosial (Stakeholder utama) merupakan konsep bantuan sosial kepada desa yang sudah memiliki kube dalam indikator mandiri. Kube masuk dalam indikator mandiri merupakan kube yang mempunyai keberhasilan dalam mengelola usahanya sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, hasil ekonomi tinggi, serta memiliki jiwa sosial yang kuat untuk membantu kepada masyarakat sekitarnya. Apabila desa memiliki kube seperti ini maka kementerian sosial akan memberikan bantuan stimulan untuk membentuk DSM. Dalam konteks ini DSM akan menjadi suatu *field* (arena) bagi para stakeholder yang terlibat dalam sinerginitas program bantuan sosial PKH dan Kube. Satakeholder menjadi aktor yang akan bermain dalam arena sosial DSM. Stakeholder yang menjadi aktor dalam proses pembentukan dari DSM adalah stakeholder utama, stakeholder pendukung dan stakeholder kunci. Dari ketiga stakeholder stakeholder kuncilah yang memiliki peran yang signifikan untuk keberhasilan dari program DSM. Stakeholder kunci dalam aturan program DSM yang disusun oleh Kementerian Sosial adalah pendamping sosial kube, aparatur desa, dan pengurus serta anggota kube. Mereka akan bermain peran dalam sautu arena sosial program DSM.

DSM yang digulirkan pemerintah akan menjadi arena sosial untuk melaksanakan praktik pemberdayaan terhadap kube yang akan ditunjuk oleh stakeholder utama. Model praktik pemberdayaan sangat berkaitan dengan konsep praktik sosial dari Piere Bourdie yaitu dengan rumusan **(Habitus x Modal) + Ranah = Praksis**. Dari rumus tersebut tampak bahwa tidak ada faktor tunggal dari tindakan sosial, karena tindakan sosial itu merupakan hasil dialektis dari arena, habitus dan modal. Dengan demikian stakeholder kunci akan memainkan peran yang aktif untuk mengolah dialektika sosial dalam mencapai keberhasilan pembentukan

DSM. Pendamping sosial akan berupaya mempertahankan konteks habitus baru yang sudah dideposisikan oleh stakeholder utama dengan mengolah 4 modal yang sudah dimiliki kubanya dalam ranah sosial DSM.

2. Marginalisasi Peran Stakeholder Kunci Sebagai Alat Untuk Menjalankan Praktik *Pseudo Government*

Praktik *pseudo government* juga terjadi pada arena sosial kube. Mereka menginginkan untuk menguasai dana dan menjadikan anggotanya sebagai pelengkap dari ketentuan aturan yang ada. Kadang anggota tidak terlibat dalam kegiatan usaha, hanya menerima sebagian kecil keuntungan dari kegiatan kube. Kadang juga ada aktor diluar sistem melibatkan diri dan menguasai Kube PKH. Akibatnya Kube tersebut hanya memberikan keuntungan bagi sekelompok kecil yang memiliki kedekatan dengan elit desa yang memiliki modal simbolik yang kuat. Dampak marginalisasi dari Pendamping Sosial Kube PKH inilah yang membuka ruang praktik *pseudo government* untuk mendominasi penguasaan bantuan sosial Kube PKH. Seperti yang disampaikan oleh salah satu Kube Mandiri di Desa Brujul Ibu Mn:

“kulo niku mboten ngertos angsal bantuan Kube PKH mas, saderenge kulo niku Cuma nampi arto saking bantuan PKH. Terus kulo ngertos-ngertos dipanggil kalihan pendamping sosial kulo ajeng angsal bantuan usaha tapi kagem kelompok kalihan sing ngelolal mangke inggih kelompok. Nanging setelah bantuan nuki cair kagem usaha jahit kulo sampun mboten dilibataken kegiatan usaha Cuma kulo memang angsal turahan saking usaha inggih kadang gangsal puluh ribu kadang inggih kirang saking niku”. (Wawancara, 17 November 2016 Pukul 09:00)

Marginalisasi terhadap anggota Kube ini telah mengikis modal sosial yang ada pada kube yang dibentuk oleh Pendamping Sosial. Rasa kegotongroyongan diantara anggota Kube berubah menjadi individualis dan mencari keuntungan pribadi. Pemahaman untuk menjadikan Kube sebagai bantuan yang harus

dikembangkan kelompok dan nanti hasilnya untuk kebersamaan dan kesetiakawanan sosial berubah menjadi penguasaan terhadap usaha yang sudah dibentuk. Marginalisasi ini sebagai konsekuensi yang harus diterima ketika praktik *pseudo government* bisa lancar untuk terus tumbuh subur dan bisa mendominasi prosesi pengguliran bantuan sosial. Hal ini yang akan menjadi hambatan untuk menjadikan kemandirian desa di Kecamatan Jaten.

3. Praktik *Pseudo Government* Pada Struktur Program Pemberdayaan Kube PKH Pengembangan DSM

Dalam program bantuan sosial yang digulirkan di masyarakat selalu menimbulkan suasana praktik *pseudo government* yang dijalankan oleh para elit penguasa untuk mencari keuntungan politis. Setiap program bantuan sosial memiliki struktur yang sistematis agar terlaksana dengan baik, terkontrol dan memiliki capaian tujuan yang maksimal. Struktur sosial dibangun oleh agen yang memiliki kapital ekonomi. Agen-agen tersebut bisa jadi pemerintah atau juga bisa berasal dari perusahaan besar yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pembentukan struktur sosial program agen pemilik kapital ekonomi melibatkan unsur yang berkaitan dengan program tersebut. Struktur ini pula yang nantinya akan menjalankan program dan membangun habitus pengguliran program dengan pencapaian tujuan yang maksimal.

Pembentukan unsur-unsur yang terlibat dalam program Kube PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri, peneliti membagi proses pelaksanaan program terbagi menjadi 3 (tiga) arena sosial yang melaksanakan aktivitas pengguliran program. Ketiga arena sosial tersebut terdiri dari arena stakeholder utama, arena stakeholder pendukung, dan terakhir arena stakeholder kunci. Pada arena stakeholder utama unsur-unsur yang terlibat yaitu Kementerian Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dan Kementerian Lembaga (KL) terkait. Pada arena ini para unsur yang terlibat diharapkan bisa menjalankan kegiatan yang sinergis dalam menentukan kebijakan

pengembangan desa sejahtera mandiri. Arena berikutnya yaitu berada pada arena stakeholder pendukung. Pada arena ini ada dua unsur utama yang menjalankan kemitraan dengan stakeholder utama maupun stakeholder kunci. Unsur tersebut adalah dunia usaha yang memiliki program CSR nya dan unsur lainya yang berada dalam arena stakeholder pendukung adalah Perguruan Tinggi. Stakeholder pendukung memiliki peran yang signifikan untuk menentukan model pemberdayaan yang relevan dengan kapital budaya maupun kapital sosial yang dimiliki oleh desa. Arena terakhir dalam pelaksanaan program Kube PKH pengembangan DSM adalah arena stakeholder kunci. Pada arena ini unsur-unsur yang terlibat adalah Pemerintah Desa, Pendamping Sosial dan Pengurus maupun anggota Kube PKH. Pada arena ini keberhasilan program untuk menjadi suatu DSM sangat menentukan.

Ketiga arena diatas memiliki potensi praktik *pseudo government* yang berbeda-beda. praktik *pseudo government* yang terjadi pada ketiga arena itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi tujuan maupun kepentingan politisnya. Setiap arena memiliki karakteristik kapital yang berbeda serta tujuan simbolisasi kekuasaan yang berbeda pula. Menurut Piere Bourdieu pada suatu arena merupakan tempat pertarungan kapital yang sangat tinggi untuk diperebutkan. Arena juga merupakan arena pertarungan (*"The field is also field of struggles.."* Bourdieu and Loic J.D. Wacquant, 1996, *An Innovation to reflexive Sociology*, Polity Press, Cambodge, UK; hal 101). Mereka menempati posisi tertentu dapat mempertahankannya atau bahkan mengubah konfigurasi kekuasaan pada tatanan arena. Bagi Bourdieu, pembedaan antara strategi antar pertarungan sangat penting (Scott Lash, 2004, "Sosiologi Postmodernisme, Kanisius, Yogyakarta, hal: 263). Dengan demikian ketiga arena yang ada pada program Kube PKH pengembangan DSM setiap agen memiliki posisi untuk mempertahankan habitus atau untuk merubah habitus program.

Praktik *pseudo government* yang terjadi pada arena stakeholder utama tidak lepas dari

motif untuk memperebutkan kapital ekonomi dan mempertahankan kapital simbolik yang dimiliki oleh salah satu aktor yang berada pada stakeholder utama. Setiap aktor memiliki kapital simbolik untuk mewujudkan kepentingan yang akan dicapai. Kapital ekonomi yang dimiliki oleh aktor utama yaitu Kementerian Sosial menjadi kapital yang ingin dikuasai oleh aktor ditingkat kabupaten dan aktor diluar struktur seperti partai politik. Mereka menjalankan praktik *pseudo government* untuk mempengaruhi kebijakan pengguliran bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak SN selaku kabid pemberdayaan di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar:

“Kamiselakupengelola bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat kadang kebingungan dalam menyalurkannya. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari partai politik melalui perwakilannya di dewan untuk memasukan data penerima manfaat dari bantuan sosial menurut versi mereka. Padahal data penerima bantuan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat. Permintaan data itu juga tidak hanya berasal dari satu partai politik saja melainkan hampir semua partai politik yang bisa mendudukan perwakilannya di DPRD Kabupaten Karanganyar” (Wawancara, 2 Desember 2016 pukul 10:00).

Dengan demikian terjadinya praktik *pseudo government* pada arena stakeholder utama penyebab utamanya adalah untuk menguasai kapital ekonomi yang dimiliki pemerintah pusat yang nantinya digunakan untuk menggulirkan bantuan. Kapital ekonomi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial memiliki potensi untuk bisa mentransformasi kapital simbolik yang dimiliki oleh individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan di daerahnya masing-masing.

4. Habitualisasi Program Desa Sejahtera Mandiri Oleh Stakeholder Utama Untuk Menekan Praktik *Pseudo Government*

Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker seperti dikutip oleh Selo Soemardjan

dan Soelaeman Soemardi, (1964), semua kegiatan manusia tunduk kepada *habitualisasi*, yaitu proses yang menjadikan suatu perilaku menjadi kebiasaan atau biasa untuk seseorang. Oleh karena itu, habitualisasi dapat diartikan dengan pembiasaan. Ketika *habitualisasi* (kebiasaan) tersebut dianggap memiliki hal yang tinggi atau bermanfaat serta diyakini oleh banyak orang, maka proses *intitualisasi* (pelembagaan) pun terbentuk. Hbitualisasi Program Kube PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri dilakukan oleh stakeholder utama. Hal ini dilaksanakan agar proses program bisa memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan melalui terbentuknya DSM. Proses habitualisasi dilakukan dengan cara menggunakan pedoman pelaksanaan program dan aturan mengikat dari struktur program yang menjalaninya.

Habitualisasi dilaksanakan secara berjenjang dari struktur-struktur yang terlibat yaitu stakeholder utama, stakholder kunci, dan stakeholder pendukung. Hal ini dilakukan agar habitualisasi yang berjalan bisa menjadi model pembiasaan program untuk bisa ditingkatkan menjadi suatu program yang melembaga. Proses habitualisasi menjadi upaya mentransformasi habitus baru pada program Kube yang pada awalnya merupakan bantuan instan dalam memberikan suatu usaha bagi keluarga miskin dirubah dalam habitus baru yaitu bahwa bantuan Kube merupakan bantuan untuk memberikan modal usaha yang kesemuanya diawali dari pembentukan kelompok, penentuan usaha sendiri, dan pengelolaan dari usaha tersebut. Proses habitualisasi yang bersifat bottom up menjadi perubahan pengguliran bantuan Kube PKH agar nantinya bisa menjadi keberlanjutan usaha secara terus-menerus. Kehendak habitualisasi ini diungkapkan oleh bapak Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Bp. NP:

“Setelah kami lakukan evaluasi terhadap program bantuan Kube yang sudah digulirkna oleh institusi Kementerian Sosial, masih banyak kendala yang membuat program ini tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Maka dari itu ditahun 2016 ini, kami menyusun kembali model

pengembangan baru yang nantinya akan menjadi konsep pengguliran bantuan Kube PKH. Perubahan ini sudah kami sosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat pada kegiatan rakorbang di bulan September tahun 2016. Dengan sosialisasi kami mengharapkan para satkeholder dibawahnya bisa melembaga model pengguliran bantuan ini".(Wawancara, 14 Oktober 2016)

Dengan demikian semua stakeholder yang memangku program harus membiasakan konsep habitus baru dan bisa diterima sebagai suatu model yang memberikan manfaat signifikan dalam mengembangkan Kube PKH untuk menjadikan Desa Sejahtera Mandiri,

5. Strategi Perlawanan Dominasi Praktik *Pseudo Government* Oleh Stakeholder Program

Praktik *pseudo government* yang terjadi dalam berbagai arena pada program Kube PKH pengembangan DSM memunculkan bentuk-bentuk strategi perlawanan. Strategi ini digunakan baik oleh para elite atau aktor-aktor yang sedang menjalankan praktik *pseudo government* maupun para stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program. Mereka menjalankan praktik *pseudo government* untuk mempertahankan habitus lama atau mentransformasi habitus baru. Para aktor diluar struktur terus berusaha untuk mempertahankan habitus lama dimana bantuan sosial dijadikan sebagai kapital ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kapital simboliknya. Praktik sebaliknya yang dilakukan oleh stakeholder utama untuk melakukan transformasi habitus dimana bantuan yang digulirkan akan sepenuhnya dalam penguasaan penerima manfaat yaitu kelompok Keluarga Miskin (KM) dan didampingi oleh pendamping sosial tanpa ada pengaruh dari kekuasaan aktor-aktor yang lainnya.

Pandangan Piere Bourdie bahwa mereka yang berada pada posisi dominan cenderung mencari strategi untuk mempertahankan posisinya sedangkan mereka yang didominasi akan mencari strategi untuk memperbaiki posisinya. Strategi yang digunakan oleh

agen dalam medan perjuangan untuk mempertahankan posisi, memperbaiki posisi, membedakan diri atau untuk memperoleh posisi-posisi baru. Hal ini dalam program bantuan Kube PKH pengembangan DSM bahwa agen-agen yang menjalankan strategi mempertahankan posisinya adalah para elit-elite desa dan partai politik yang berkuasa. Sedangkan mereka yang mempertahankan posisinya adalah para pendamping sosial dan para pemangku kepentingan lainnya yang masuk dalam struktur program di stakeholder utama.

Strategi dalam pandangan Bourdie merupakan hasil yang terus berlanjut dari interaksi antara disposisi habitus dan kendala sertasegakemungkinannya. Strategi merupakan orientasi spesifik dari praktik. Strategi bukanlah semata hasil dari suatu perencanaan yang sadar dan terarah secara mekanistik. Dalam bahasa Bourdie, strategi adalah: "*the product of the partial sense as the feel of game.*" (Piere Bourdie. 1990. *In Other Words. Essay Toward Reflexive Soscology*, translated by Matthew Adamson, Polity Press, Cambridge, UK, hlm: 61). Para agen yang terlibat dalam Program bantuan Kube PKH pengembangan DSM baik dari stakeholder utama, stakeholder pendukung, maupun stakeholder kunci memiliki strategi sendiri dalam melaksanakan disposisi habitus yang akan digunakan sebagai perubahan habitus lama.

Ada dua strategi yang terjadi dalam melawan praktik *pseudo government* yaitu strategi investasi ekonomi dan strategi simbolis. Strategi inverstasi ekonomi sangat relevan untuk melawan model ortodoxa yang sedang dijalankan oleh aktor yang berada diluar struktur program. Strategi ini justru membantu mengeluarkan kube dari doxa dan bisa melakukan proses heterodoxa dalm upaya mengembangkan modal ekonomi serta memandirikan kube untuk bisa mengembangkan pembentukan Desa Sejahtera Mandiri. Melalui strategi investasi ekonomi, kube bisa berkembang sesuai dengan harapan dari stakeholder utama. Strategi ini akan memperkuat modal lain seperti modal budaya dan modal ekonomi yang mendukung untuk memandirikan kube. Disamping itu strategi ekonomi akan

memperkuat modal simbolik kube sehingga mereka tidak akan dikendalikan oleh elit-elit desa yang menginginkan bantuan kube. Sedangkan strategi simbolis dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kekuatan usaha yang sedang dikelolanya. Mereka mempertahankan model karakteristik produk yang dimilikinya untuk bisa melakukan persaingan pada tingkat pemasaran. Mereka berupaya untuk mengembangkan usaha sehingga memiliki keberhasilan dalam usaha ekonomi produktifnya.

Strategi yang dimunculkan dengan memberikan penekanan melalui peraturan yang dibuat oleh stakeholder utama yaitu Kementerian Sosial. Disamping aturan yang tegas juga dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga jalannya Kube PKH pengembangan DSM bisa berjalan semestinya yaitu membangun kemandirian desa dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial. Seperti diungkapkan oleh sekretaris direktur pemberdayaan sosial Kementerian Sosial:

“Untuk melancarkan Program Kube PKH dalam membentuk Desa Sejahtera Mandiri maka kami selaku stakeholder yang berwenang untuk melaksanakan program ini telah menyusun aturan untuk mengatur proses jalannya Kube agar berjalan sesuai dengan harapan, untuk memandirikan mereka melalui usaha yang sudah dipilih serta bisa menjadi pelopor dari pembentukan Desa Sejahtera Mandiri. Kami juga memperkuatnya dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terus menerus sehingga penyimpangan yang terjadi dilapangan bisa diminimalisir”. (Wawancara, 12 Desember 2016)

Aturan yang dibuat oleh stakeholder sebagai upaya strategi yang dilakukan oleh stakeholder utama untuk bisa melaksanakan transformasi habitus dari pola bantuan lama. Dengan kekuatan modal simbolik yang dimilikinya dan posisi yang diakui secara sah oleh undang-undang untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan pengalangan bantuan program Kementerian Sosial saya bisa memberikan tekanan kepada para agen-

agen lain yang terlibat dalam struktur program seperti stakeholder pendukung dan stakeholder kunci. Tujuan utamanya untuk mensukseskan program pembentukan Desa Sejahtera Mandiri. Disamping itu praktik *pseudo government* yang dijalankan oleh aktor elite desa juga tidak bisa mempengaruhi jalannya program pemberdayaan Kube PKH.

D. SIMPULAN

Ada beberapa aspek modus para aktor kepentingan untuk menjalankan praktik *pseudo government* pada pengalangan bantuan sosial pemberdayaan Kube PKH pengembangan desa sejahtera mandiri. Pertama, untuk mempertahankan modal simboliknya yang sudah dimiliki agar bisa mereproduksi modal-modal lain sehingga mereka tetap bisa menguasai ranah sosial politik di Kecamatan Jaten. Konsep pemikiran bourdieu menjelaskan bahwa aktor yang mampu menguasai modal-modal di tataran rana maka mereka akan bisa mengendalikan struktur ranah untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Aspek kedua, adalah untuk mendapatkan modal finansial dalam bentuk bantuan sosial sehingga aktor tersebut bisa memperkuat dari modal simbolik yang dimilikinya. Kedua aspek demikianlah yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh stakeholder program.

Pemberdayaan program bantuan sosial Kube PKH pengembangan di Kecamatan Jaten ternyata tidak selalu tunduk terhadap aktor yang melakukan praktik *pseudo government* yang menginginkan penguasaan bantuan sosial yang digulirkan. Para aktor yang berada pada stakeholder utama dan kunci secara kolektif melakukan perlawanan untuk mempertahankan bantuan sosial agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan memandirikan desa. Proses perlawanan ini merupakan konsep heterodoxa yang terjadi pada dinamika masyarakat penerima bantuan sosial yang hanya dijadikan doxa oleh para aktor-aktor penguasa. Dengan demikian proses perlawanan kolektif ini terjadi dalam rangka penguatan modal-modal yang dimiliki oleh Kube dan pendamping sosial Kube.

Dalam rangka untuk memandirikan Kube yang nantinya akan bisa mengembangkan untuk menciptakan kemandirian desa di Kecamatan Jaten maka stakeholder utama juga memberikan penguatan modal budaya, modal sosial, modal finansial serta modal politis dalam tataran aturan yang mengikat sehingga para pelaku pemberdayaan bisa melaksanakan secara baik. Penguatan demikian telah memproduksi modal simbolik di kalangan Kube penerima bantuan sosial. Hal inilah yang bisa dijadikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa berjalan sesuai dengan arahan pedoman yang sudah disusunnya. Sehingga praktik *pseudo goverment* yang dilakukan oleh aktor penguasa bisa ditekan pengaruhnya negatif pada proses pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat. Dengan demikian tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan targetnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Karanganyar. (2016). *"Kecamatan Jaten Dalam Angka 2016"*. Karanganyar: Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Bourdieu, Pierre. (1977). *Outline Of Theory of Practice*. Cambridge: Polity Press
- _____. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Translated by Richard Nice)*. United State Of America: Harvard College.
- Bourdieu, Pierre (1977) *Outline of a Theory of Practice*, London: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Terjemahan dari *La Distinction: Critique Sociale du Jugement* (1979), Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre. (1993) *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Leisure*, New York: Columbia University Press.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. (2016). *Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Mutahir, Arizal. (2011). *"Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu"*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

JURNAL

- Adib , Mohammad. *"Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu"*. Biokultur Vol. 1/No. 2/ Juli-Desember. Universitas Airlangga Surabaya: 2012.
- Krisdinanto, Nanang. *"Pierre Bourdieu, Sang Juru Dama"*. Kanal Vol. 2 No.2. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya: 2014.

INTERNET

- <http://www.tempo.com>, Minggu, 20 Desember 2015, diakses Kamis, 02 Oktober 2014 jam 14:25 WIB.
- <http://www.kompas.com>, Minggu, 20 Desember 2015, diakses Kamis, 02 Oktober 2014 jam 14:25 WIB
- <http://www.tnp2k.go.id>, diakses Senin, 21 Desember 2015 jam 14:25 WIB
- <http://www.kemensos.go.id>, diakses Senin, 21 Desember 2015 jam 14:25 WIB.
- <http://www.kompasiana.com/abafina/bourdieu-dan-modal-sosial>, di akses Senin, 22 Mei 2017

